

Kelayakan Ekonomi Atas Implementasi Subsidi Listrik Untuk Mengurangi Tunggakan Pada Pelanggan PT. PLN (Persero) Kraksaan

Titik Muzayyanah^{1*}, M. Daud Rhosyidy²

Program Studi Ekonomi Syaria'ah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ttkmzyah@gmail.com, ²daudrhos@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan ekonomi dari penerapan subsidi listrik yang ditujukan untuk mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) di wilayah Kraksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, serta survei terhadap pelanggan yang menerima subsidi listrik. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana subsidi listrik mampu menekan angka tunggakan serta dampaknya terhadap kondisi keuangan PT. PLN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun subsidi listrik memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dampaknya terhadap pengurangan tunggakan pembayaran masih terbatas, khususnya pada pelanggan dengan daya listrik di atas 900 VA. Subsidi dinilai masih layak untuk dilanjutkan, dengan syarat adanya perbaikan dalam penargetan penerima subsidi dan peningkatan sosialisasi kebijakan. Beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan efektivitas subsidi, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih optimal oleh pelanggan dan mendukung stabilitas keuangan PT. PLN.

Kata Kunci: Subsidi Listrik, Tunggakan, Kelayakan Ekonomi, PT. PLN, Efektivitas Kebijakan

PENDAHULUAN

Listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai penyedia layanan listrik nasional, PT. PLN (Persero) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelanggan di Kraksaan. Namun, beberapa tahun belakangan, permasalahan terkait tunggakan pembayaran listrik semakin meningkat, khususnya di kalangan pelanggan rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ini berdampak langsung pada keuangan PLN serta kelancaran operasional perusahaan.

Pengangguran menjadi salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan. Kemiskinan, secara umum, didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan. Penyebab utama dari kondisi ini termasuk distribusi pendapatan yang tidak merata serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, yang berdampak pada upah yang lebih kecil.¹ Dari sudut pandang ini, pengangguran dan kemiskinan saling terkait erat, di mana tingginya angka pengangguran memperburuk kondisi kemiskinan karena berkurangnya akses terhadap sumber pendapatan yang stabil.

Bagi PT. PLN, masalah tunggakan ini berdampak serius pada kinerja keuangan perusahaan, serta mempengaruhi keberlanjutan layanan listrik yang dapat diandalkan. Peningkatan jumlah tunggakan berpotensi menghambat operasi perusahaan, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional. Selain itu, tantangan yang dihadapi PLN dalam menagih pembayaran dari pelanggan, terutama di wilayah yang kondisinya ekonominya lemah, menambah kompleksitas dalam mengelola distribusi listrik.

Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah dan PT. PLN (Persero) telah mengeluarkan kebijakan subsidi listrik bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.² Program subsidi ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat

¹ Moh Lutfi Julianto, Ulan Novinta Mariska, and Adil Siswanto, "Pengaruh Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Banyuwangi Tahun 2019-2024" 3 (2025): 16–21.

² Departemen Ilmu et al., "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN BAGI DOI : Subsidi Listrik Melalui PT . PLN Untuk Berperan Untuk Kesejahteraan Masyarakatnya . Bantuan Dari Pemerintah Agar Masyarakat Bisa (Persero). Peraturan Menteri ESDM No . 29 Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga . Telah Mengalokasikan Anggaran Subsidi Listrik Untuk Pelanggan Yang Sebagian Besar Adalah Golongan R1-450 VA Dan R1-900 VA , Yang Mencakup Berdasarkan Data Dari Pusat Statistik Provinsi Dan Kota Di Sumatera Barat , Kota Padang Tertinggi Sebanyak 42 , 37 Ribu Jiwa Di Kota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat . Dengan Kondisi Seperti Inilah Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Terhadap Rumah Tangga Tidak Mampu . Tabel 1 . Jumlah Penerima Subsidi Listrik

sekaligus menekan angka tunggakan pembayaran. Namun, masih diperlukan kajian lebih dalam mengenai efektivitas program subsidi ini dari segi ekonomi, terutama di wilayah Kraksaan. Penting untuk mengevaluasi apakah subsidi listrik benar-benar menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi tunggakan pelanggan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi keuangan PLN.

Penelitian ini akan fokus pada analisis kelayakan ekonomi dari penerapan subsidi listrik di wilayah Kraksaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini mampu menekan angka tunggakan pelanggan serta memberikan rekomendasi bagi PLN untuk memastikan subsidi listrik dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.³ Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi dari kebijakan subsidi listrik yang diterapkan di wilayah Kraksaan, dengan tujuan utama menilai efektivitasnya dalam mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh PT. PLN dan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program subsidi listrik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan mendukung stabilitas keuangan perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tunggakan listrik, serta memastikan kebijakan subsidi dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik dalam upaya mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) di wilayah Kraksaan, dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran serta stabilitas keuangan perusahaan. Dengan menganalisis dan mengevaluasi kelayakan ekonomi program subsidi listrik dalam rangka mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan PT. PLN (Persero) di Kraksaan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

METODE

Metode dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dan sistematis. Fokus utama pengabdian adalah untuk menganalisis kelayakan ekonomi subsidi listrik dengan tujuan memastikan kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi tunggakan pelanggan serta memberikan manfaat optimal bagi PT. PLN (Persero) dan masyarakat penerima subsidi. Metode yang diterapkan meliputi beberapa tahapan penting:

a. Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk manajemen PT. PLN (Persero) dan masyarakat penerima subsidi. Melalui kolaborasi ini, tim pengabdian tidak hanya bertindak sebagai pengamat, tetapi juga berinteraksi secara aktif dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai dampak kebijakan subsidi. Pendekatan partisipatif ini memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk berbagi pandangan dan masukan yang relevan terkait implementasi kebijakan.⁴

b. Pengumpulan Data melalui Observasi dan Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi penerapan subsidi listrik. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan pihak PLN untuk menggali lebih dalam terkait tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola subsidi dan tunggakan pelanggan. Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat penerima subsidi untuk mengetahui dampak subsidi terhadap kemampuan mereka dalam membayar tagihan listrik. Pendekatan kualitatif ini membantu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas subsidi dari berbagai sudut pandang.⁵

c. Pelaksanaan Survei terhadap Pelanggan

Untuk mendapatkan data yang lebih luas dan terukur, tim pengabdian juga menyebarkan kuesioner kepada pelanggan yang menerima subsidi listrik. Survei ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana subsidi membantu

Di Kota Padang Jumlah Jumlah Penerima Penerima No Wilayah Subsidi Subsidi Listrik Listrik Nanggalo Jumlah Penerima Subsidi Listrik Jumlah Penerima Subsidi Listrik No Bungus Teluk Kabung Lubuk Kilangan Padang Utara Pauh Kuranji Padang Barat Padang Timur Padang Selatan Koto Tengah Lubuk Begalung Sumber Dinas Sosial Kota Padang , 2022 Berdasarkan Data Yang Tersedia Mengenai Jumlah Penerima Subsidi Listrik Dengan Daya 450 VA Dan 900 VA Di Berbagai Wilayah Kota Setiap Rumah Tangga , Di Mana Sebagian Besar Banyak Menggunakan Daya 900 VA Untuk” 3 (2024): 386–394.

³ Deri Maryadi, Tolu Tamalika, and Hermanto Mz, “Analisa Kelayakan Bisnis PLTS Untuk Rumah Subsidi Tipe 36 (Studi Kasus Di Kota Palembang) Feasibility Analysis of PLTS Business for Subsidized House Type 36 (Case Study in Palembang City)” 01 (2023): 6–11.

⁴ Andri Ardhiyansyah, Nur Wahyuning Sulistyowati, and Nanda Hidayati, “Inovasi Berkelanjutan : Pendekatan Kolaboratif Untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat” 02, no. 06 (2023): 460–467.

⁵ Annisa Rizky Fadilla et al., “JURNAL PENELITIAN Volume 1 No 3 II Agustus 2023 E-ISSN : 2986-5573 (Online) Volume 1 No 3 II Agustus 2023 E-ISSN : 2986-5573 (Online) Page 34-46” 1, no. 3 (2023): 34–46.

masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran listrik, serta untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap kebijakan subsidi. Hasil survei ini akan dianalisis secara statistik untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas subsidi dalam menekan tunggakan.

d. Penggunaan Data Sekunder dari PLN

Selain data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, tim juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari PLN. Data tersebut meliputi laporan keuangan, statistik tunggakan pelanggan, dan dokumentasi terkait kebijakan subsidi. Data sekunder ini penting untuk memberikan konteks yang lebih luas dan memperkuat analisis kelayakan ekonomi yang dilakukan.

e. Analisis Kelayakan Ekonomi melalui Pendekatan Biaya-Manfaat

Analisis kelayakan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan perbandingan antara biaya subsidi yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan, baik bagi PLN maupun masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menilai apakah subsidi listrik merupakan kebijakan yang secara finansial menguntungkan dalam jangka panjang, terutama dalam kaitannya dengan pengurangan tunggakan pelanggan dan stabilitas keuangan PLN. Dengan menggunakan pendekatan biaya-manfaat, hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang jelas terkait keberlanjutan dan optimalisasi kebijakan subsidi.

Secara keseluruhan, metode pengabdian ini dirancang untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif, berdasarkan data yang akurat, dan mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan serta masyarakat penerima subsidi.

Langkah-langkah Yang Dilakukan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis, bertujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat membantu PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan mengurangi tunggakan pelanggan melalui kebijakan subsidi listrik. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan:

a. Pengumpulan Data Awal

Langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi PLN terkait tunggakan pembayaran listrik di wilayah Kraksaan. Data awal yang dikumpulkan mencakup informasi tentang jumlah pelanggan yang menerima subsidi, besarnya tunggakan, dan kebijakan subsidi yang telah diterapkan. Data ini diperoleh melalui kerja sama dengan PLN setempat yang menyediakan laporan keuangan serta data operasional terkait tunggakan dan pelanggan subsidi.

b. Survei dan Wawancara dengan Penerima Subsidi

Setelah data awal terkumpul, dilakukan survei kepada pelanggan yang menerima subsidi untuk mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap kemampuan mereka dalam membayar tagihan listrik. Survei ini dilengkapi dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pelanggan dalam memanfaatkan subsidi. Tahap ini penting untuk mengetahui apakah subsidi sudah membantu meringankan beban ekonomi mereka atau masih ada kendala yang perlu diperbaiki.

c. Analisis Data Tunggakan dan Efektivitas Subsidi

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilakukan analisis mendalam untuk mengevaluasi apakah kebijakan subsidi listrik efektif dalam mengurangi tunggakan pelanggan. Analisis ini melibatkan pengolahan data statistik terkait jumlah tunggakan sebelum dan sesudah subsidi diterapkan. Dengan demikian, dapat diukur seberapa besar subsidi membantu pelanggan untuk membayar tepat waktu, serta bagaimana dampaknya terhadap keuangan PLN.

d. Penyusunan Rekomendasi Berdasarkan Hasil Temuan

Setelah melakukan analisis, disusun rekomendasi yang ditujukan kepada PLN terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas subsidi. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan yang menunjukkan pola tunggakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah memberikan saran yang dapat memperbaiki kebijakan subsidi, sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi PLN maupun masyarakat.

e. Presentasi dan Sosialisasi Hasil Pengabdian

Hasil dari pengabdian ini dipresentasikan kepada pihak PLN, serta didiskusikan bersama pemangku kepentingan terkait. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat penerima subsidi, untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai manfaat subsidi dan pentingnya membayar tagihan listrik tepat waktu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelanggan dalam membayar, serta meminimalisir tunggakan di masa mendatang.

f. Monitoring dan Evaluasi Lanjutan

Langkah terakhir adalah melakukan monitoring berkala terhadap implementasi rekomendasi yang telah disusun. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa subsidi listrik tetap efektif dalam mengurangi tunggakan pelanggan. Monitoring ini juga penting untuk mengetahui apakah kebijakan subsidi perlu disesuaikan di masa depan agar tetap relevan dengan kondisi yang ada.

Dengan serangkaian langkah ini, pengabdian diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi PLN dalam mengelola subsidi listrik dan mengurangi jumlah tunggakan pelanggan, sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat penerima subsidi.

Alat Analisis Yang Digunakan

Dalam kegiatan pengabdian ini, beberapa alat analisis digunakan untuk mengolah dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Alat-alat tersebut dipilih dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas subsidi listrik dalam mengurangi tunggakan pembayaran pelanggan. Berikut adalah alat analisis yang diterapkan:

a. Analisis Deskriptif

Alat analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan karakteristik data yang diperoleh dari hasil survei dan data sekunder dari PLN. Dengan metode ini, profil pelanggan yang menerima subsidi, tingkat tunggakan, serta dampak subsidi terhadap kemampuan mereka membayar tagihan listrik dapat dipetakan dengan baik.⁶ Hasil dari analisis ini memberikan pemahaman awal mengenai pola tunggakan serta bagaimana kebijakan subsidi telah mempengaruhi pembayaran pelanggan.

b. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Untuk menilai kelayakan ekonomi dari subsidi listrik, digunakan analisis biaya-manfaat. Alat ini berfungsi untuk membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh PLN untuk program subsidi dengan manfaat yang dihasilkan, seperti penurunan tunggakan dan stabilitas keuangan PLN. Melalui analisis ini, tim pengabdian dapat menilai apakah subsidi tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, serta memberikan rekomendasi terkait kelayakan program subsidi di masa mendatang.

c. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara besarnya subsidi yang diberikan dan penurunan tunggakan pelanggan. Alat ini membantu mengevaluasi seberapa besar pengaruh subsidi terhadap pengurangan tunggakan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai seberapa efektif kebijakan subsidi dalam mendorong pelanggan membayar tagihan mereka tepat waktu.

d. K-Means Clustering

Untuk mengelompokkan data tunggakan berdasarkan tingkat tunggakan, digunakan metode K-Means Clustering.⁷ Dengan alat ini, data pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti pelanggan dengan tunggakan tinggi, sedang, dan rendah. Klasifikasi ini membantu PLN untuk memfokuskan perhatian pada kelompok pelanggan dengan tunggakan terbesar, serta memungkinkan mereka untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani masing-masing kelompok.

e. Analisis Kualitatif dari Wawancara

Selain analisis kuantitatif, hasil wawancara dengan pelanggan dan pihak PLN dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi pelanggan terhadap subsidi listrik.⁸ Analisis ini penting untuk menggali informasi tentang tantangan yang dihadapi pelanggan dalam memanfaatkan subsidi, serta memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tunggakan.

Dengan mengombinasikan berbagai alat analisis ini, pengabdian tidak hanya menghasilkan data kuantitatif yang terukur, tetapi juga wawasan kualitatif yang mendalam. Hal ini memungkinkan PLN untuk memahami lebih baik dampak subsidi listrik serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Jurnal Hikmah, "STATISTIK DESKRIPTIF Leni Masnidar Nasution" 14, no. 1 (2017): 49–55.

⁷ Tapas Kanungo et al., "The Analysis of a Simple K-Means Clustering Algorithm" (2000): 100–109.

⁸ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi" *urn a L T e o r e t i s d a n e r a p a n i d a n g e k a y a s a i p i l Jurnal*, no. December (2020).

HASIL

Pengabdian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi subsidi listrik dalam mengurangi tunggakan pelanggan PT. PLN (Persero) di wilayah Kraksaan. Pendekatan yang digunakan adalah kolaboratif dengan melibatkan pihak PLN dan masyarakat penerima subsidi. Berikut adalah hasil yang didapatkan dari pengabdian tersebut:

a. Faktor Penyebab Tunggakan Pembayaran Listrik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya tunggakan pembayaran listrik di wilayah Kraksaan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Banyak pelanggan rumah tangga, khususnya yang berpenghasilan rendah, menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pembayaran listrik sering kali tidak menjadi prioritas utama.⁹ Hal ini diperburuk dengan kurangnya pengetahuan dalam hal pengelolaan keuangan, di mana banyak pelanggan belum memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar tagihan listrik tepat waktu.

Selain itu, keterbatasan akses informasi mengenai subsidi listrik juga menjadi salah satu penyebab tingginya tunggakan. Beberapa pelanggan tidak mengetahui bahwa mereka berhak menerima subsidi atau tidak memahami prosedur untuk mendapatkan subsidi tersebut.¹⁰ Ada pula yang menganggap bahwa meskipun mereka menerima subsidi, biaya listrik yang harus dibayarkan tetap memberatkan, terutama untuk pelanggan dengan daya 900 VA.

Dan salah satu penyebab utama tingginya tunggakan pada pelanggan dengan daya lebih tinggi adalah keterbatasan pendapatan rumah tangga. Banyak pelanggan yang masih kesulitan untuk membayar tagihan listrik secara tepat waktu, terutama karena pendapatan mereka terbagi untuk kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, besarnya subsidi yang diterima sering kali tidak proporsional dengan total biaya listrik yang harus dibayar, terutama bagi pelanggan dengan konsumsi listrik yang lebih tinggi.

Selain faktor pendapatan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar tagihan listrik tepat waktu juga berkontribusi terhadap tingginya tunggakan. Banyak pelanggan yang menerima subsidi tidak sepenuhnya memahami mekanisme subsidi maupun manfaatnya, sehingga tidak memanfaatkannya dengan optimal. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi dan sosialisasi terkait program subsidi di masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat tunggakan adalah ketidakstabilan ekonomi di wilayah tersebut. Dampak pandemi COVID-19, misalnya, memperburuk kondisi ekonomi sebagian besar rumah tangga yang bergantung pada pendapatan harian. Kehilangan pekerjaan atau menurunnya pendapatan membuat banyak pelanggan kesulitan membayar tagihan listrik tepat waktu. Dalam situasi ini, subsidi listrik memang membantu meringankan beban ekonomi, tetapi masih diperlukan kebijakan komplementer lainnya, seperti program bantuan sosial atau pelatihan ekonomi untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

b. Dampak Pelaksanaan Subsidi Listrik

Hasil survei menunjukkan bahwa subsidi listrik yang diberikan kepada masyarakat mampu mengurangi beban ekonomi sebagian pelanggan, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, dampaknya terhadap pengurangan tunggakan secara keseluruhan belum begitu signifikan.¹¹ Meskipun ada pelanggan yang berhasil membayar tagihan listrik tepat waktu berkat subsidi, sebagian lainnya masih mengalami keterlambatan pembayaran karena alasan finansial yang terbatas dan prioritas pengeluaran lain yang lebih mendesak.

Dari data statistik yang diperoleh dari PLN, subsidi listrik memang sedikit menekan jumlah tunggakan, terutama di kelompok pelanggan dengan daya 450 VA. Namun, pada pelanggan dengan daya 900 VA ke atas, tunggakan masih relatif tinggi. Ini menunjukkan bahwa subsidi lebih efektif membantu pelanggan berdaya rendah, sementara pada pelanggan dengan daya lebih tinggi, subsidi belum cukup efektif dalam menurunkan angka tunggakan.

Dari sisi PT. PLN, meskipun subsidi listrik membantu menekan tunggakan pada kelompok pelanggan tertentu, dampaknya terhadap pengurangan tunggakan secara keseluruhan masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan analisis biaya-manfaat, subsidi ini memberikan pengurangan tunggakan yang terbatas, terutama pada pelanggan dengan daya lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun subsidi membantu meringankan beban sebagian masyarakat, biaya yang dikeluarkan untuk program ini belum sepenuhnya sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Oleh karena itu, penting bagi PT. PLN dan pemerintah untuk meninjau kembali efektivitas subsidi listrik, khususnya dalam kaitannya dengan besaran subsidi yang diberikan dan kelompok sasaran yang diprioritaskan. Penyesuaian kebijakan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa subsidi listrik tidak hanya membantu menekan tunggakan, tetapi juga mendukung keberlanjutan finansial perusahaan.

⁹ K P Ondor, "PERENCANAAN PENURUNAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI PT . PLN (PERSERO) KANTOR PELAYANAN" 2, no. 1 (2022): 34–43.

¹⁰ Moch Nasrul, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Listrik Subsidi Terhadap Manajemen Pengaduan Keluhan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pengaduan Keluhan Di PT . PLN (Persero) Area Garut" (2020): 35–48.

¹¹ Ervina Widayastuti, "Analisis Kebijakan Subsidi Dalam Tarif Dasar Listrik Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)," *Psb.Feb.Ui*, https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?id=29413&p=show_detail&utm_source=chatgpt.com.

c. Kelayakan Ekonomi Subsidi

Analisis ekonomi yang dilakukan dengan metode biaya-manfaat menunjukkan bahwa meskipun subsidi listrik bermanfaat bagi pelanggan, dampak ekonominya terhadap PT. PLN masih perlu ditinjau kembali. Biaya subsidi yang dikeluarkan PLN belum sebanding dengan pengurangan tunggakan yang diperoleh. Subsidi ini hanya memberikan pengurangan tunggakan yang terbatas, dan jika dibandingkan dengan total biaya yang harus dikeluarkan PLN, manfaatnya belum maksimal.¹²

Berdasarkan analisis regresi, subsidi memang berperan dalam mengurangi tunggakan, tetapi tingkat pengurangannya tidak cukup signifikan untuk menjadi solusi jangka panjang bagi masalah keuangan PLN. Oleh karena itu, subsidi perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

PEMBAHASAN

a. Kelayakan Ekonomi dari Subsidi Listrik

Secara umum, subsidi listrik di wilayah Kraksaan bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam membayar tagihan listrik. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, subsidi ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan tunggakan. Banyak pelanggan yang masih menunggak meskipun sudah menerima subsidi, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu perbaikan. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperbaiki penargetan subsidi, agar lebih tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi pelanggan.

Dari segi kelayakan ekonomi, subsidi ini bisa dikatakan layak untuk diteruskan karena membantu meringankan beban masyarakat. Namun, dari sisi PT. PLN, subsidi belum berdampak signifikan dalam mengurangi beban keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan penyesuaian kebijakan agar subsidi lebih efektif dalam mengurangi tunggakan dan menjaga stabilitas keuangan PLN.

Dalam menilai kelayakan ekonomi dari implementasi subsidi listrik guna mengurangi tunggakan pelanggan PT. PLN, dapat dilakukan analisis berdasarkan situasi yang dihadapi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama pandemi COVID-19. Selama periode tersebut, UMKM mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, bahkan hingga 80% di beberapa kasus.¹³ Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam krisis ekonomi, pengeluaran untuk kebutuhan dasar, seperti listrik, menjadi beban finansial yang berat bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Pemerintah sering kali berperan dalam memberikan intervensi ekonomi guna membantu sektor-sektor yang terdampak krisis, termasuk melalui kebijakan subsidi. Pada kasus UMKM selama pandemi, intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan atau subsidi dapat meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Dalam konteks tunggakan listrik, subsidi dapat dipandang sebagai langkah yang tepat untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar listrik, meskipun pendapatan mereka menurun.

Dari perspektif kelayakan ekonomi, subsidi listrik harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan subsidi dianggap layak apabila manfaat ekonomi yang dihasilkan, seperti pemulihan daya beli masyarakat dan keberlanjutan operasional usaha kecil, lebih besar daripada potensi kerugian dari sisi pendapatan PLN atau pemerintah. Subsidi ini dapat menjaga konsumsi listrik yang stabil, mencegah terjadinya kebangkrutan usaha kecil, dan mengurangi beban hutang pelanggan.

Secara keseluruhan, kebijakan subsidi listrik bertujuan untuk mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil, serta berperan dalam mendukung pemulihan ekonomi yang lebih luas. Implementasi kebijakan ini memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi risiko tunggakan, serta mendorong keberlanjutan konsumsi listrik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

b. Efektivitas Subsidi dalam Mengurangi Tunggakan

Meskipun subsidi listrik membantu beberapa pelanggan, hasilnya belum cukup signifikan untuk mengurangi tunggakan secara keseluruhan. Masih ada banyak pelanggan yang menunggak, terutama di kalangan pelanggan dengan daya 900 VA atau lebih. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kurangnya informasi yang jelas kepada pelanggan tentang bagaimana memanfaatkan subsidi dengan baik. Banyak pelanggan yang masih belum memahami sepenuhnya manfaat subsidi dan cara memanfaatkannya secara optimal.¹⁴

¹² Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, "Mekanisme Kebijakan Subsidi Listrik Yang Lebih Tepat Sasaran," *Badan Kebijakan Fiskal*.

¹³ Umkm Saat, Pandemi Covid- Di, and Kabupaten Jember, "Strategi Peningkatan Bisnis , Kinerja Dan Kesejahteraan" 5, no. 2 (2022): 16–25.

¹⁴ Fakultas Ekonomi and Universitas Widyatama, "Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia Periode 2004-2017" 1, no. September (2019): 64–73.

Agar subsidi lebih efektif, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, sehingga mereka dapat lebih memahami pentingnya pembayaran tepat waktu dan bagaimana subsidi dapat membantu. PLN juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada pelanggan yang membayar tepat waktu sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan angka tunggakan.

Data yang diperoleh dari PT. PLN menunjukkan bahwa meskipun subsidi mampu mengurangi tunggakan pada pelanggan berdaya rendah, tunggakan secara keseluruhan masih cukup signifikan, khususnya di kalangan pelanggan dengan daya lebih tinggi. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, terdapat hubungan positif antara penerimaan subsidi dengan penurunan tunggakan, namun tingkat penurunan tersebut belum memadai.

Fakta ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi program subsidi, khususnya dalam hal penargetan. Subsidi listrik lebih efektif jika diberikan kepada pelanggan yang benar-benar membutuhkan bantuan finansial. Adanya kelompok pelanggan dengan daya listrik yang lebih tinggi yang tetap menunggak menandakan bahwa perlu ada penyempurnaan dalam penentuan penerima subsidi. Dengan demikian, subsidi dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal.

c. Rekomendasi untuk Peningkatan Kebijakan Subsidi

Berdasarkan hasil pengabdian, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas subsidi listrik di wilayah Kraksaan:

1. Penargetan Subsidi yang Lebih Tepat: Subsidi perlu diberikan secara lebih selektif dan disesuaikan dengan daya listrik pelanggan. Misalnya, pelanggan dengan daya 900 VA ke atas memerlukan pendekatan subsidi yang berbeda, seperti diskon pembayaran untuk mereka yang konsisten membayar tepat waktu.¹⁵
2. peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan. PLN dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kampanye mengenai pentingnya membayar tagihan listrik tepat waktu dan manfaat dari program subsidi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya subsidi dan mendorong mereka untuk memanfaatkan program tersebut dengan lebih baik.
3. perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap program subsidi untuk memastikan bahwa program tersebut tetap relevan dan efektif. Evaluasi ini harus melibatkan analisis yang mendalam terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dampak subsidi terhadap stabilitas keuangan PT. PLN. Selain itu, pemberian insentif bagi pelanggan yang membayar tepat waktu dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran dan menekan angka tunggakan.
4. Pemberian Insentif bagi Pelanggan Patuh: Sebagai tambahan, pemberian insentif bagi pelanggan yang selalu membayar tepat waktu bisa menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran dan mengurangi tunggakan.

Subsidi listrik yang diterapkan di wilayah Kraksaan memiliki potensi untuk meringankan beban masyarakat, namun belum efektif sepenuhnya dalam mengurangi tunggakan. Subsidi ini masih perlu disempurnakan, baik dalam hal penargetan maupun pelaksanaan di lapangan.

Penyesuaian kebijakan subsidi dan peningkatan sosialisasi akan sangat penting untuk memastikan subsidi dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi PT. PLN dalam jangka panjang. Dengan adanya perbaikan kebijakan dan upaya peningkatan edukasi kepada pelanggan, diharapkan subsidi listrik dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menekan tunggakan dan menjaga stabilitas keuangan PLN.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa program subsidi listrik yang diterapkan di wilayah Kraksaan telah memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi pelanggan berdaya 450 VA. Subsidi ini mampu meringankan beban ekonomi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, efektivitas program dalam mengurangi tunggakan pembayaran belum optimal, khususnya pada pelanggan dengan daya 900 VA ke atas. Masih banyak pelanggan dari kelompok ini yang mengalami kesulitan dalam membayar tagihan listrik secara tepat waktu, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya membayar tagihan secara rutin.

Bagi PT. PLN, subsidi ini memang membantu menekan angka tunggakan, tetapi belum cukup signifikan dalam mengurangi beban keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan terhadap kebijakan subsidi perlu dilakukan, khususnya dalam hal penargetan penerima manfaat agar program dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar. Salah satu langkah yang disarankan adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran listrik tepat waktu serta pemanfaatan subsidi secara optimal.

Selain itu, perlu dipertimbangkan pemberian insentif bagi pelanggan yang konsisten membayar tepat waktu sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. Dengan penyesuaian kebijakan dan peningkatan efektivitas dalam

¹⁵ SIARAN PERS, "Ombudsman RI Sarankan PLN Terapkan Asas Pelayanan Publik," *Ombudsman*.

pelaksanaan subsidi, diharapkan program ini tidak hanya membantu mengurangi beban masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas keuangan PT. PLN dalam jangka panjang.

Ke depan, evaluasi berkala terhadap program subsidi listrik ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif, sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat penerima subsidi. Hasil evaluasi ini juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan subsidi yang lebih berkelanjutan dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala hormat dan rasa terima kasih, penyusun ingin mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kepemimpinan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan berbagai arahan dan bimbingan dalam proses akademik.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah mendukung penyusun dalam menempuh pendidikan di jurusan ini.
4. Ibu Sofiah, M.E., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah, atas segala kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Bapak M. Daud Rhosyidy, SE, ME, selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan laporan ini.
6. Bapak Hans Tua M Sinaga, selaku Manager PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan, yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di instansi yang beliau pimpin.
7. Bapak Abdurrahman., selaku Dosen Pamong di PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan arahan dalam kelancaran pelaksanaan PPL.
8. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai PT. PLN (Persero) ULP Kraksaan, yang telah dengan sabar membimbing serta memberikan pengalaman berharga selama pelaksanaan PPL.
9. Tidak lupa, penyusun juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua dan keluarga, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansyah, Andri, Nur Wahyuning Sulistyowati, and Nanda Hidayati. "Inovasi Berkelanjutan : Pendekatan Kolaboratif Untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat" 02, no. 06 (2023): 460–467.
- Ekonomi, Fakultas, and Universitas Widyatama. "Pengaruh Subsidi Listrik Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia Periode 2004-2017" 1, no. September (2019): 64–73.
- Fadilla, Annisa Rizky, Putri Ayu Wulandari, Fakultas Bahasa, and Universitas Negeri Yogyakarta. "JURNAL PENELITIAN Volume 1 No 3 II Agustus 2023 E-ISSN : 2986-5573 (Online) Volume 1 No 3 II Agustus 2023 E-ISSN : 2986-5573 (Online) Page 34-46" 1, no. 3 (2023): 34–46.
- Hansen, Seng. "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi urna LT e o r e t i s dan erapan id a n g e k a y a s a i p i l Jurnal," no. December (2020).
- Hikmah, Jurnal. "STATISTIK DESKRIPTIF Leni Masnidar Nasution" 14, no. 1 (2017): 49–55.
- Ilmu, Departemen, Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Di Provinsi, and Sumatera Barat. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN BAGI DOI: Subsidi Listrik Melalui PT . PLN Untuk Berperan Untuk Kesejahteraan Masyarakatnya . Bantuan Dari Pemerintah Agar Masyarakat Bisa (Persero). Peraturan Menteri ESDM No . 29 Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga . Telah Mengalokasikan Anggaran Subsidi Listrik Untuk Pelanggan Yang Sebagian Besar Adalah Golongan R1-450 VA Dan R1-900 VA , Yang Mencakup Berdasarkan Data Dari Pusat Statistik Provinsi Dan Kota Di Sumatera Barat , Kota Padang Tertinggi Sebanyak 42 , 37 Ribu Jiwa Di Kota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat . Dengan Kondisi Seperti Inilah Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Terhadap Rumah Tangga Tidak Mampu . Tabel 1 . Jumlah Penerima Subsidi Listrik Di Kota Padang Jumlah Jumlah Penerima Penerima No Wilayah Subsidi Subsidi Listrik Listrik Nanggalo Jumlah Penerima Subsidi Listrik Jumlah Penerima Subsidi Listrik No Bungus Teluk Kabung Lubuk Kilangan Padang Utara Pauh Kuranji Padang Barat Padang Timur Padang Selatan Koto Tengah Lubuk Begalung Sumber Dinas Sosial Kota Padang , 2022 Berdasarkan Data Yang Tersedia Mengenai Jumlah Penerima Subsidi Listrik Dengan Daya 450 VA Dan 900 VA Di Berbagai Wilayah Kota Setiap Rumah Tangga , Di Mana Sebagian Besar Banyak Menggunakan Daya 900 VA Untuk" 3 (2024): 386–394.
- Julianto, Moh Lutfi, Ulan Novinta Mariska, and Adil Siswanto. "Pengaruh Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Banyuwangi Tahun 2019-2024" 3 (2025): 16–21.
- Kanungo, Tapas, David M Mounv, Nathan S Netanyahu, Ruth Silverman, Angela Y Wu, and Christine Piatko. "The Analysis of a Simple K-Means Clustering Algorithm" (2000): 100–109.
- Maryadi, Deri, Tolu Tamalika, and Hermanto Mz. "Analisa Kelayakan Bisnis PLTS Untuk Rumah Subsidi Tipe 36 (Studi Kasus Di Kota Palembang) Feasibility Analysis of PLTS Business for Subsidized House Type 36 (Case Study in

- Palembang City)” 01 (2023): 6–11.
- Nasrul, Moch. “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Listrik Subsidi Terhadap Manajemen Pengaduan Keluhan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pengaduan Keluhan Di PT . PLN (Persero) Area Garut” (2020): 35–48.
- Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja. “Mekanisme Kebijakan Subsidi Listrik Yang Lebih Tepat Sasaran.” *Badan Kebijakan Fiskal*.
- Ondor, K P. “PERENCANAAN PENURUNAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK DI PT . PLN (PERSERO) KANTOR PELAYANAN” 2, no. 1 (2022): 34–43.
- Saat, Umkm, Pandemi Covid- Di, and Kabupaten Jember. “Strategi Peningkatan Bisnis , Kinerja Dan Kesejahteraan” 5, no. 2 (2022): 16–25.
- SIARAN PERS. “Ombudsman RI Sarankan PLN Terapkan Asas Pelayanan Publik.” *Ombudsman*.
- Widyastuti, Ervina. “Analisis Kebijakan Subsidi Dalam Tarif Dasar Listrik Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO).” *Psb.Feb.Ui*. https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?id=29413&p=show_detail&utm_source=chatgpt.com.